



**DPRD KOTA YOGYAKARTA**  
**SUARA WAKIL RAKYAT**  
JL. IPDA TUT HARSONO 43 YOGYAKARTA TELP. (0274) 513571

DORONG KEMAJUAN USAHA BERSAMA

## Pemerintah Harus Berperan Pertumbuhan Koperasi

**Dra Sri Retnowati,**  
Fraksi Golkar

**YOGYA (KR)** - Perkembangan ekonomi digital belakangan ini perlu disikapi secara baik oleh masyarakat. Salah satunya dapat diwujudkan melalui koperasi lantaran menganjalkan sistem kerja sama dalam pengembangan usaha. Pemerintah, terutama Pemkot Yogya pun diminta ikut berperan guna pertumbuhan koperasi.

"Ekonomi digital selaras dengan ekonomi kreatif. Sebenarnya tidak perlu modal besar untuk bisa menjalankan usaha di era digital. Masyarakat justru dapat membentuk sebuah koperasi dan menjalankan usaha bersama," urai anggota Fraksi Golkar yang juga duduk di Komisi B DPRD Kota Yogya, Dra Sri Retnowati.

Pembentukan koperasi, imbuh Sri Retnowati, juga harus memperhatikan aspek legalitas atau badan hukumnya. Hal ini supaya bisa menjadi sasaran campur tangan pemerintah dalam hal pembinaan maupun permodalan. Apalagi kucuran dana hibah untuk pengembangan usaha kini hanya bisa dicapai melalui koperasi berbadan hukum.

Di samping itu, koperasi yang dibentuk harus didahului perencanaan

KR-Ardhi Wahdan

**Dra Sri Retnowati,**

yang matang serta tidak terjebak pada kepentingan sesaat. Hal ini supaya sistem pengelolannya lebih terarah serta unit usahanya dapat beragam. "Jangan hanya bergerak pada simpan pinjam saja, tapi harus ada usaha yang berjalan secara berkelanjutan. Sistem kerja sama yang diwujudkan melalui koperasi justru menjadi kekuatan ekonomi saat ini," imbuhnya.

Oleh karena itu, Sri Retnowati mendorong masyarakat kembali mem-

perkuat koperasi di wilayahnya. Banyaknya usaha mikro kecil atau UMKM di tiap kampung dapat digenot penghasilannya melalui koperasi. Sehingga kemajuan sebuah usaha tidak semata menjadi kewajiban secara personal atau individu melainkan tanggung jawab bersama.

Hasil pendataan Dinas Koperasi UMK Tenaga Kerja dan Transmigrasi, terdapat 457 koperasi di Kota Yogya. Namun hampir separuh atau sekitar 218 koperasi di antaranya dinyatakan kurang sehat lantaran beberapa kali tidak mampu menggelar rapat anggota.

"Terhadap koperasi yang kurang sehat ini, dinas harus bisa menggali persoalannya seperti apa. Ketika pengelola masih memiliki komitmen, ada baiknya didampingi. Bagaimana pun juga, setiap koperasi yang maju, keuntungannya akan dirasakan oleh masyarakat, bukan pribadi," paparnya.

Sri Retnowati menegaskan, pondasi utama ekonomi justru berasal dari koperasi. Hal ini karena selain berdasarkan pada kerja sama, seluruh anggota juga memiliki hak yang sama. Sehingga kemajuan dan kemandirian usaha sangat bergantung dari gotong royong setiap anggota. **(Dhi)-e**

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Koperasi UKM Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 24 September 2024  
Kepala

**Ig. Trihastono, S.Sos. MM**  
NIP. 19690723 199603 1 005